



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI**

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa atas berkenan-Nyalah kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026. Penyusunan awal Renstra ini dimaksud sebagai langkah strategis dalam upaya Pemberdayaan Nagari/Desa untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Masyarakat Nagari/Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup.

Rencana Starategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung 2021-2026 untuk 5 (lima) tahun kedepan agar mekanisme perencanaan, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat serta dapat dijadikan acuan dalam pengendalian program/kegiatan yang lebih baik dan berorientasi kepada hasil dengan target yang ada diakhir RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2026, dan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja SKPD sebagaimana Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam prosesnya memerlukan keterlibatan semua pihak dalam penyusunan rencana program dan kebijakan strategis dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan Rencana Strategis yang telah dibuat.

Muaro Sijunjung, 23 September 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari



Khamsiardi, SSTP, M.Si
NIP 19830908 200201 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

Daftar Tabel iii

BAB. I Pendahuluan

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.3.1. Maksud 3

 1.3.2. Tujuan..... 3

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB. II Gambaran Pelayanan

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5

 2.1.1. Struktur Organisasi DPMN 5

 2.1.2. Tugas dan Fungsi 6

 2.2 Sumber Daya..... 11

 2.2.1. Kondisi Sumber daya Manusia DPMN..... 11

 2.2.2. Kualitas dan Kuantitas..... 12

 2.3 Kinerja Pelayanan 13

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 18

BAB. III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi
 Pelayanan 20

 3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil
 Kepala Daerah Terpilih 22

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/
 Kabupaten/Kota 25

 3.4 Telaahan rencana Tata ruang Wilayah dan kajian
 Lingkungan Hidup Strategis 30

 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 31

BAB. IV Tujuan dan Sasaran

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 32

BAB. V Strategi dan Arah Kebijakan 34

BAB. VI Rencana Program dan Pendanaan 36

BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 50

BAB. VIII Penutup 51

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 13

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 14

Tabel 3.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan..... 20

Tabel 3.2
Faktor pendorong dan penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 23

Tabel 3.3
Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMD Propinsi Sumatera Barat 27

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari..... 33

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 34

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 37

Tabel 7.1
Indikator Kinerja 47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat. Disamping itu urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari ini adalah merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan amanat pemerintah dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang desa, hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Berpartisipasi untuk memperbaiki diri sendiri mulai dari aspek kualitas SDM, ekonomi maupun lingkungan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 pada prinsipnya disusun secara parallel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Metodologi penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai bagian perencanaan yang terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi serta berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan persoalan yang mungkin dan akan timbul.

Keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencana dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru untuk periode 2021-2026 dan disusunnya RPJMD periode 2021-2026 yang mengusung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Untuk mendukung Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 yang dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2002-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai instrument perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi

	Pelayanan
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota
	3.4 Telaahan rencana Tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB. IV	Tujuan dan Sasaran
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB.V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB. VI	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
BAB. VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB. VIII	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 48 Tahun 2016 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis Dinas
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Pemerintahan Nagari
4. Kepala Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1. Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari dua (2) sub bagian yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Bidang Pemerintahan Nagari.

Bidang Pemerintahan Nagari terdiri dari:

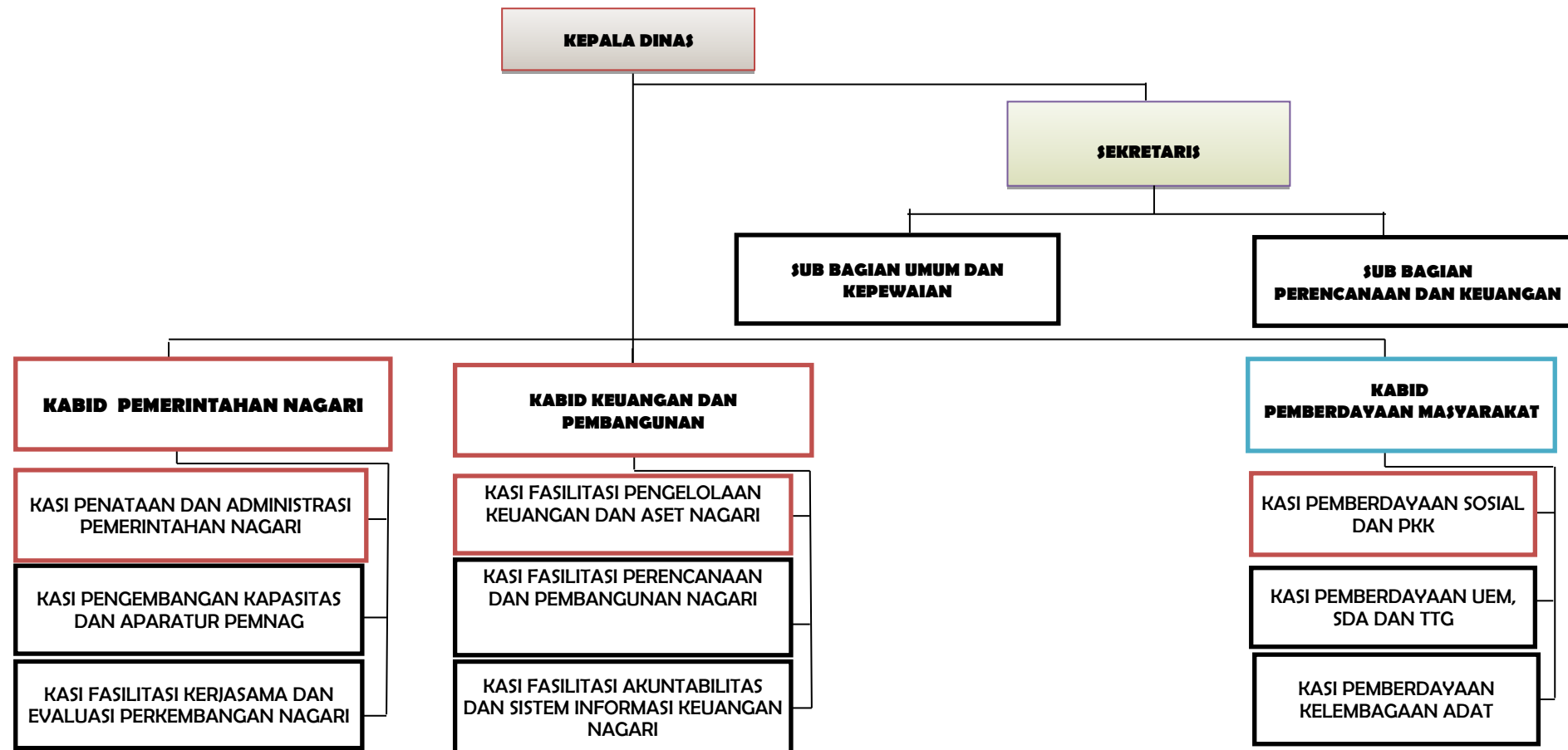
- a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Nagari
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Aparatur Pemerintahan Nagari
- c. Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Nagari

3. Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari

Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
 - b. Seksi Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Nagari
 - c. Seksi Fasilitasi Akuntabilitas dan Sistem Informasi Keuangan Nagari
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan PKK
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber daya alam, dan Teknologi Tepat Guna
 - c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG



2.1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 48 Tahun 2016 Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari di atas.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan dinas, untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan fungsi tersebut sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- c. Mengelola kepegawaian, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemerintahan Nagari

Bidang Pemerintahan Nagari Mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pemerintahan nagari, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Nagari Menyenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali Nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan Wali Nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali Nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari,fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari,fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari,fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.
 - d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari,fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;
4. Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari
- Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari melaksanakan tugas di Bidang keuangan dan pembangunan nagari, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang keuangan dan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan LPM, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),

- Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, kelembagaan adat
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

2.2.1 Kondisi Sumber daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung jumlah 48 orang (keadaan 31 Agustus 2021) yang terdiri dari PNS, Tenaga Harian Lepas (THL), untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai

= 24 Orang
2. Kualifikasi Pendidikan

- Strata 2 (S2)

= 4 Orang

- Strata 1 (S1)/Diploma IV

= 13 Orang

- Diploma I/Diploma III

= 2 Orang

- SLTA

= 5 Orang
3. Pejabat Struktural

- Eselon II.b

= 1 Orang

- Eselon III.a

= -

- Eselon III.b

= 3 Orang

- Eselon IV.a

= 10 Orang
4. Kekuatan Pegawai

- Gol. IV/b

= 1 Orang

- Gol. IV/a

= 1 Orang

- Gol. III/d

= 2 Orang

- Gol. III/c

= 11 Orang

- Gol. III/b

= 4 Orang

- Gol. III/a

= 2 Orang

- Gol. II/d

= 2 Orang

- Gol. II/a

= 1 Orang
5. Tenaga Harian Lepas (THL)

= 23 Orang

2.2.2 Kualitas dan Kuantitas Aset yang dikelola

Adapun jenis dan jumlah aset yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah dan Kondisi			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor	1	-	-	-
2.	Kendaraan				
	a. Roda 4	3	1	-	-
	b. Roda 2	11	-	-	-
3.	Meja	51	11	-	4
4.	Kursi	97	-	-	-
5.	Lemari	25	-	-	-
6.	Rak Kayu	6	-	-	-
7.	Buffet Kayu	1	-	-	-
8.	Lemari Besi	6	-	-	-
9.	Filling Besi/Cabinet	2	-	-	11
10.	Brand Kas	1	-	-	-
11.	Komputer	13	-	-	2
12.	Laptop / Notebook	18	-	-	3
13.	Printer	18	-	-	3
14.	CPU	-	-	-	1
15.	Monitor	-	-	-	1
16.	UPS	-	-	-	5
17.	Tustel	5	-	-	3
18.	Camera Attachment	4	-	-	-
19.	Handy Cam	2	-	-	1
20.	Infocus	2	-	-	2
21.	Digital Multimeter	1	-	-	-
22.	Televisi	2	-	-	-
23.	Microphone	2	-	-	-
24.	Sound System	2	-	-	-
25.	Telephone (PABX)	-	-	-	1
26.	Pesawat Telephone	1	-	-	-
27.	Facsimile	-	-	-	1
28.	Mesin Absensi	1	-	-	-

29.	Mesin Ketik	1	-	-	1
30.	Alat Penghancur Kertas	-	-	-	1
31.	Air Conditioner (AC Unit)	14	-	-	2
32.	Kipas Angin	4	2	2	-
33.	Karpet	7	-	-	-
34.	Tenda	1	-	3	-
35.	Tangga Alumunium	1	1	-	-
36.	Vacuum Cleaner	2	-	-	-
37.	Alat Pemadam Portable	2	-	-	-
38.	Gen Set (Generator Set)	1	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sampai Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nagari cepat berkembang				12	17	22	27	32	13	20	36	38	39	100	100	100	100	100
2.	Persentase kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang aktif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Nagari
Kabupaten Sijunjung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	592.648.097	611.561.138	422.427.103	392.389.366	304.048.536	572.062.744	603.172.975	422.184.690	378.921.125	303.862.100	96,53%	98,63%	99,94%	96,57%	99,94%	464.614.848	456.040.727
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	195.554.660	257.269.000	292.379.000	329.802.000	793.678.179	187.429.749	238.317.633	280.936.237	317.737.513	771.734.235	95,85%	92,63%	96,09%	96,34%	97,24%	373.736.568	359.231.073
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor																-	-
Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	143.391.800	348.219.620	234.959.000	204.800.000	199.100.000	140.825.524	331.988.090	229.643.500	191.240.775	196.345.600	98,21%	95,34%	97,74%	93,38%	98,62%	226.094.084	218.008.698
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																-	-
Peningkatan Sumber Daya Aparatur	32.000.000	15.000.000	21.750.000	15.000.000	6.641.500	31.815.193	15.000.000	21.750.000	14.861.000	6.641.500	99,42%	100,00%	100,00%	99,07%	100,00%	18.078.300	18.013.539
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																-	-
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan		13.000.000		13.082.800	29.792.709		11.969.200		12.932.100	29.454.860		92,07%		98,85%	98,87%	11.175.102	10.871.232
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																-	-
Biaya Operasional TP-PKK Kabupaten Sijunjung	330.249.775					325.561.106					98,58%					66.049.955	65.112.221
Jambore Kader PKK	129.075.315					127.960.500					99,14%					25.815.063	25.592.100
Lomba Nagari Berprestasi dan Penilaian KAN Terbaik	259.596.896					252.825.945					97,39%					51.919.379	50.565.189
Koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan Masyarakat	153.841.550					151.698.350					98,61%					30.768.310	30.339.670
Fasilitasi LKAAM	78.594.450					78.179.800					99,47%					15.718.890	15.635.960
Fasilitasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	50.872.000					50.535.300					99,34%					10.174.400	10.107.060
Pembinaan Posyandu	148.919.865					142.824.325					95,91%					29.783.973	28.564.865
Fasilitasi dan Monitoring Pembentukan BUMNAG	187.464.132					147.212.730					78,53%					37.492.826	29.442.546
Fasilitasi dan pembinaan SPMN	23.256.927					19.153.450					82,36%					4.651.385	3.830.690
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa																-	-
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	150.227.100					143.427.273					95,47%					30.045.420	28.685.455
Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari	545.604.210					514.329.038					94,27%					109.120.842	102.865.808
Pembinaan dan Monitoring UPK dan BPSPAM/PAMSIMAS	105.969.960					92.390.950										21.193.992	18.478.190
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari																-	-
Pembinaan administrasi Pemerintahan, Pendataan asset, dan Administrasi Keuangan Nagari	658.656.235					621.847.145					94,41%					131.731.247	124.369.429
Pelatihan Walinagari/Sekretaris Nagari dan Aparatur Nagari	914.349.253					907.040.900					99,20%					182.869.851	181.408.180
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemerintahan nagari	227.379.164					210.526.173					92,59%					45.475.833	42.105.235
Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat																-	-
Pemberian Makanan Tambahan/Kudapan Anak Sekolah Dasar	340.583.810					339.885.650					99,80%					68.116.762	67.977.130
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari																-	-
Peningkatan Kapasitas bagi Wali Nagari, Aparatur Nagari dan Lembaga Nagari		318.643.100					305.057.520					95,74%				63.728.620	61.011.504
Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Nagari dan BPN			379.135.980					368.635.952					97,23%			75.827.196	73.727.190
Pelatihan BPN		112.033.400					105.465.593					94,14%				22.406.680	21.093.119
Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Nagari		60.602.000	50.160.753				58.586.063	49.999.100				96,67%	99,68%			22.152.551	21.717.033
Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari		173.384.000	156.372.875				161.045.202	146.844.314				92,88%	93,91%			65.951.375	61.577.903
Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan BPN serta Kajian Pemekaran Nagari dan Jorong		347.797.500	120.108.825				235.595.743	117.188.608				67,74%	97,57%			93.581.265	70.556.870
Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan Nagari																-	-
Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Nagari dan BPN				380.519.877	188.287.900				369.874.508	188.271.190				97,20%	99,99%	113.761.555	111.629.140

Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari				57.109.154	7.053.100				56.207.749	7.053.100				98,42%	100,00%	12.832.451	12.652.170
Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan BPN serta Kajian Pemekaran Nagari dan Jorong				843.183.962	52.325.960				792.546.502	52.203.720				93,99%	99,77%	179.101.984	168.950.044
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Keuangan		242.450.600					226.138.588					93,27%				48.490.120	45.227.718
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari				72.524.400	145.040.150				69.437.700	144.392.280				95,74%	99,55%	43.512.910	42.765.996
Fasilitasi Batas Administrasi Nagari dan Penataan Nagari					39.324.920					38.744.570					98,52%	7.864.984	7.748.914
Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Nagari					33.531.100				33.531.100					100,00%		6.706.220	6.706.220
Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan aset nagari		107.684.200	83.837.200	58.998.250	54.094.450		99.929.565	83.715.630	54.690.997	53.933.300		92,80%	99,85%	92,70%	99,70%	60.922.820	58.453.898
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Nagari		50.292.400	35.283.050	25.890.825	23.374.530		37.492.025	34.512.270	24.316.514	23.374.460		74,55%	97,82%	93,92%	100,00%	26.968.161	23.939.054
Fasilitasi Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari		106.264.000	111.917.500	108.599.600	69.971.043		96.900.825	111.233.410	91.331.110	69.627.825		91,19%	99,39%	84,10%	99,51%	79.350.429	73.818.634
Pembekalan Aparatur Pembina Pemerintahan Nagari		122.608.000	120.823.705	69.349.532			121.493.500	120.158.955	64.815.898			99,09%	99,45%	93,46%		62.556.247	61.293.671
Fasilitasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Nagari		67.160.900	57.304.655	62.363.268	76.848.600		66.574.535	57.266.500	61.509.090	76.424.250		99,13%	99,93%	98,63%	99,45%	52.735.485	52.354.875
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan-kegiatan Bidang Keuangan dan Pembangunan					91.247.940					90.770.353					99,48%	18.249.588	18.154.071
Pembinaan Administrasi Keuangan Nagari			108.469.000	96.497.900	18.716.320			107.254.859	90.722.784	18.695.570			98,88%	94,02%	99,89%	44.736.644	43.334.643
Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan Nagari			46.255.000	327.095.630	65.918.203			45.038.568	305.102.148	64.044.271			97,37%	93,28%	97,16%	87.853.767	82.836.997
Fasilitasi Kerja sama Nagari			41.672.250	45.356.000	5.094.000			34.097.176	45.115.932	5.094.000			81,82%	99,47%	100,00%	18.424.450	16.861.422
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari																-	-
Biaya Operasional TP PKK Kabupaten Sijunjung		337.241.150	351.905.750				323.150.450	338.631.387				95,82%	96,23%			137.829.380	132.356.367
Jambore Kader PKK		201.309.400	191.198.948				199.916.880	189.973.315				99,31%	99,36%			78.501.670	77.978.039
Lomba Nagari Berprestasi		130.295.000	109.237.650				128.837.725	107.572.611				98,88%	98,48%			47.906.530	47.282.067
Koordinasi Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		126.200.000	93.306.525				121.174.488	92.521.100				96,02%	99,16%			43.901.305	42.739.118
Fasilitasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)		50.460.000	43.985.200				47.891.342	40.351.400				94,91%	91,74%			18.889.040	17.648.548
Pembinaan Posyandu		120.645.400	101.992.115				118.613.950	100.250.400				98,32%	98,29%			44.527.503	43.772.870
Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		65.205.000	30.018.350				56.224.600	29.562.800				86,23%	98,49%			19.044.670	17.157.480
Fasilitasi dan Pendayagunaan Profil Nagari		63.850.000	42.988.000				57.515.056	39.285.260				90,08%	91,39%			21.367.600	19.360.063
Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Nagari		62.475.000	45.109.250				60.085.745	42.592.937				96,18%	94,42%			21.516.850	20.535.736
Pemberian Makanan Tambahan/Kudapan Anak Sekolah Dasar			224.432.195					222.205.620					99,01%			44.886.439	44.441.124
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari																-	-
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		146.705.000	176.367.787				140.530.550	175.704.010				95,79%	99,62%			64.614.557	63.246.912
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari		73.813.000	59.407.310				62.750.900	59.111.750				85,01%	99,50%			26.644.062	24.372.530
Pembinaan dan Monitoring BPSPAM/PAMSIMAS		55.505.600	43.007.300				45.104.900	41.140.200				81,26%	95,66%			19.702.580	17.249.020
Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari		306.906.300	202.006.110				266.216.902	200.514.900				86,74%	99,26%			101.782.482	93.346.360
Pembinaan dan Fasilitasi Posyantek dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		84.721.740	62.437.578				82.559.950	61.270.702				97,45%	98,13%			29.431.864	28.766.130
Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa		61.237.000	52.282.081				52.194.850	51.658.672				85,23%	98,81%			22.703.816	20.770.704
Program Pengembangan dan Kesehatan Masyarakat																-	-
Pemberian Makanan Tambahan anak Sekolah Dasar		327.848.787					288.537.225					88,01%				65.569.757	57.707.445
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Nagari																-	-
Pembinaan dan Monitoring UPK Paska PNPB		52.391.000	37.052.420				43.863.450	34.813.700				83,72%	93,96%			17.888.684	15.735.430
Pembinaan dan Monitoring BUMNAG		112.971.700	111.511.293				98.059.466	107.135.220				86,80%	96,08%			44.896.599	41.038.937
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Adat																-	-
Penyelenggaraan Pelatihan Pemangku Adat dan Bundo Kanduang		66.995.000	116.301.960				54.857.600	115.199.700				81,88%	99,05%			36.659.392	34.011.460
Penilaian KAN Terbaik		2.040.000	54.731.488				2.040.000	46.219.600				100,00%	84,45%			11.354.298	9.651.920
Fasilitasi LKAAM Kabupaten Sijunjung		86.013.000	83.606.934				53.482.685	81.262.350				62,18%	97,20%			33.923.987	26.949.007
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Nagari																-	-
Jambore Kader PKK				236.841.650					235.524.232					99,44%		47.368.330	47.104.846
Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan					246.592.772					246.433.423					99,94%	49.318.554	49.286.685

Lomba Nagari Berprestasi				92.437.986					85.330.876					92,31%		18.487.597	17.066.175
Koordinasi Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan				407.039.971	102.868.716				406.382.411	102.727.472				99,84%	99,86%	101.981.737	101.821.977
Fasilitasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)				149.901.950	17.821.420				136.590.716	17.701.900				91,12%	99,33%	33.544.674	30.858.523
Pembinaan Posyandu				115.393.820	652.549.723				113.488.220	649.556.805				98,35%	99,54%	153.588.709	152.609.005
Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				280.568.100	4.321.100				246.773.830	4.321.100				87,96%	100,00%	56.977.840	50.218.986
Fasilitasi dan Pendayagunaan Profil Nagari				35.049.882	3.417.050				32.242.060	3.417.050				91,99%	100,00%	7.693.386	7.131.822
Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Nagari				40.138.008	76.057.750				36.595.787	75.615.490				91,17%	99,42%	23.239.152	22.442.255
Pemberian Makanan Tambahan anak Sekolah Dasar				94.954.881	45.858.070				94.499.507	45.809.102				99,52%	99,89%	28.162.590	28.061.722
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)				143.914.425	85.256.396				140.017.293	85.256.396				97,29%	100,00%	45.834.164	45.054.738
Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga				306.701.810	249.671.610				300.794.676	231.017.011				98,07%	92,53%	111.274.684	106.362.337
Pembinaan dan Monitoring BPSPAM/PAMSIMAS				25.551.700	9.001.351				25.352.150	8.880.450				99,22%	98,66%	6.910.610	6.846.520
Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari				167.945.825	21.212.570				164.364.700	21.006.420				97,87%	99,03%	37.831.679	37.074.224
Pembinaan dan Fasilitasi Posyantek dan Teknologi Tepat Guna (TTG)				83.470.561	17.365.326				79.687.260	17.318.850				95,47%	99,73%	20.167.177	19.401.222
Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa				36.532.200	3.107.150				35.488.650	3.107.150				97,14%	100,00%	7.927.870	7.719.160
Penilaian KAN Terbaik				43.255.350					42.796.800					98,94%		8.651.070	8.559.360
Pembinaan dan Monitoring BUMNAG				71.088.620					70.981.750					99,85%		14.217.724	14.196.350
Pembinaan dan Monitoring UPK Paska PNPM				20.201.900					20.036.500					99,18%		4.040.380	4.007.300
Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat				127.614.340	157.686.520				123.215.650	156.789.200				96,55%	99,43%	57.060.172	56.000.970
Fasilitasi LKAAM dan Bundo Kandang Kabupaten Sijunjung				42.105.670	42.420.904				39.480.300	42.194.950				93,76%	99,47%	16.905.315	16.335.050
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun					1.064.950					1.064.950					100,00%	212.990	212.990
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan					1.634.500					1.634.500					100,00%	326.900	326.900
Fasilitasi Lembaga Ekonomi Nagari					52.412.276					52.158.850				99,52%		10.482.455	10.431.770

Dalam kurun waktu 2016-2020 beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, diantaranya jumlah nagari berkembang rasio capaian melebihi 100%, berdasarkan surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 bahwa jumlah desa berkembang pada Kabupaten Sijunjung sebanyak 39 Nagari.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi (lingkungan). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa/nagari untuk mensejahterakan kehidupan desa/nagari.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
- 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- 5) Desa Mandiri (> 0,815).

Sebagai gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sijunjung dari tahun 2016 (pengukuran 2017) sampai dengan tahun 2019 (pengukuran 2020), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Status Nagari di Kabupaten Sijunjung Berdasarkan
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017-2020

No	STATUS NAGARI	2016	2017	2018	2019
		(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
1	Sangat Tertinggal	3	-	-	-
2	Tertinggal	39	14	5	-
3	Berkembang	13	36	38	39
4	Maju	6	10	17	18
5	Mandiri	-	1	1	4
	Jumlah	61	61	61	61

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat status perkembangan nagari di Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 sudah tidak ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Sijunjung.

Berkaitan dengan persentase kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang aktif capaian sebesar 100%, pencapaian ini di dapat dari 50 lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Aspek Kelembagaan, seperti Sarana prasarana dan Aspek Kompetensi, seperti Penyelenggaraan organisasi yang sudah memiliki Rencana Kerja Tahunan, AD/ART, baru memenuhi kriteria minimal dan dapat di kategorikan Aktif, dari 4 (empat) aspek yang menjadi tolak ukur untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga terdepan dalam pemyarakatan pengimplementasian ABS-SBK.

Tabel 2.3
Data Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang aktif Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nagari		Ketua KAN
1	Sijunjung	1	Muaro	Chusaini Dt. Khatib Pangulu
		2	Sijunjung	Harmon Dt Panghulu Sati
		3	Silokek	Mayarman Dt Kali Bandaro
		4	Durian Gadang	Harmon Monti Sutan
		5	Paru	Afrizal Sutan Bandaro Kayo
		6	Aie Angek	Siman Dt. Kayo
		7	Solok Ambah	Helmi Yandara Dt. Rajo Alam
		8	Pematang Panjang	L. Dt. Bandaro Kuniang
		9	Kandang Baru	R. Dt Rajo Nan Kayo
2	Koto VII	10	Limo Koto	Jupri Dt.Simarajo
		11	Guguak	Khaidir Dt. Pangulu Kayo
		12	Tanjung	Mismihadi Dt. Majo Sinaro
		13	Palaluar	Himzar Kali Majo Dindo
		14	Padang Laweh	Juprizal Dt. Bandaro Sutan
3	Sumpur Kudus	15	Silantai	Naswardi Dt Sampono Ameh
		16	Sisawah	Pauskar Antoni Dt. Panghulu Dubalang
		17	Kumanis	Markias Gogar Marajo
		18	Tanjung Bonai Aur	Zulma Fitra Dt. Gindo Jalelo
		19	Tamparungo	Safi'i Malin Panghulu
		20	Sumpur Kudus '	Zulhardika Putra Lobai Galombang
		21	Manganti	Jasman Rang Kayo Mudo
		22	Unggan	Amril Dt. Indo Puto
4	Kamang Baru	23	Sungai Lansek	Syafri Antoni Dt. Nan Kayo
		24	Aie Amo	Kaswin Dt. Andiko Rajo
		25	Sungai Betung	Darlisman Dt. Rang Kayo Mudo
		26	Padang Tarok	Ajisman Dt. Paduko Kayo
		27	Lubuk Tarantang	Asril Dt. Rajo Limpapi
		28	Kamang	Martius Dt. Jombang
		29	Kunpar	Saiful Bahri Dt. Lelo
		30	Siaur	Mursal Dt. Paduko Rajo
		31	Muaro Takuang	Ali Hasmi Dt. Saru Rajo
5	IV Nagari	32	Palangki	MR. Dt. Pangulu Sati
		33	Muaro Bodi	Adril Limbu Batuah
		34	Koto Baru	Andi Dian Putra Dt. Panghulu Sati
		35	Mundam Sakti	Dul Asri. Dt. Rajo Nan Kayo
		36	Koto Tuo	Rustam Dt. Rajo Bandaro

6	Tanjung Gadang	37	Sibakur	Zainal Dt. Endah Kayo
		38	Tanjung Gadang	AT. Datuak Bijo Dirajo
		39	Pulasan	A. Dt. Mankudun Sati
		40	Taratak Baru	Hairus Penghulu Sati
		41	Tanjung Lolo	Misdarman Dt. Lipati
		42	Timbulun	Mansurdin Dt. Paduko
		43	Langki	Abus Ab. Dt. Marajo Indo
7	Kupitan	44	Padang Sibusuk	Hasmizon Pandito Bosa, SE, M.Si
		45	Pamuatan	Emirzon Priyadi Dt Panguluh Mudo, S.Pt
		46	Batu Manjuluh	Ramlis Dt Panguluh Kayo
8	Lubuk Tarok	47	Lubuk Tarok	Ir. AA. Paduko Rajo
		48	Lalan	Ilyasman Pandito Malin
		49	Buluh Kasok	Z. Dt. Kalituo
		50	Silongo	Djanawar Paduko Kayo

Mengingat tanggung jawab pembinaan kehidupan bermasyarakat (beradat dan beragama, bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga menjadi tanggungjawab multi *stakeholders* di daerah ini, baik ulama, tokoh adat serta masyarakat. Pemerintah nagari menyadari bahwa KAN sebagai lembaga yang menaungi para ninik mamak (penghulu adat) di nagari, maka peran lembaga KAN akan memberikan konstribusi yang tidak sedikit dalam upaya pemasyarakatan nilai-nilai adat ditengah kehidupan masyarakat nagari.

Walaupun secara kuantitas target capaian untuk indikator pembangunan pemberdayaan masyarakat dan nagari sudah tercapai, namun secara kapasitas/kualitas perlu ditingkatkan kembali. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencapaian target yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat/lembaga adat dan peningkatan kapasitas terhadap aparatur nagari supaya lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selama kurun waktu 2016-2020 telah terjadi berbagai perkembangan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung. Beberapa kegiatan baru yang dilaksanakan disesuaikan dengan amanat pemerintah UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut dan membantu memfasilitasi nagari dalam menyiapkan diri utamanya kapasitas aparat nagari untuk melaksanakan urusannya sendiri maka perlu untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Aparatur nagari dalam Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keungan Nagari dan Pengelolaan Pemerintahan Nagari. Begitu juga dengan lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat.

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan maka dampaknya terhadap Pemerintahan Kabupaten Sijunjung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap melalui BumNag/BumDes dimana sejak 2015 sd sekarang telah terbentuk 58 BumNag/BumDes di Kab. Sijunjung dengan kondisi sebagaimana data tabel berikut :

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BUMNAG/BUMDES
PER KECAMATAN

sd 2019 update Januari 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUMNAG/ DES YG TERBENT UK	JUMLAH BUMNAG/BUMDES		JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH PENYERTAAN MODAL SD 2019
			MEMILIKI USAHA	TELAH MENERIMA PENYERTAAN MODAL		
1	SUMPUR KUDUS	11	7	8	13	750,353,580.00
2	KAMANG BARU	10	7	8	11	627,581,150.00
3	SIJUNJUNG	9	8	8	13	1,155,000,000.00
4	IV NAGARI	5	5	5	10	675,000,000.00
5	KUPITAN	4	3	3	7	600,000,000.00
6	TANJUNG GADANG	9	5	0	5	-
7	KOTO VII	6	6	6	14	700,000,000.00
8	LUBUK TAROK	4	4	1	9	533,000,000.00
	JUMLAH TOTAL	58	45	39	82	5,040,934,730.00

Penataan perekonomian nagari melalui BumNag bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa/nagari serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa/Nagari, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir.

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/NAGARI
SEMESTER I TAHUN 2021

KODE REK	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari	889,108,017	236,865,918	652,242,099
1.1.1	Hasil Usaha Nagari	300,342,564	059,283,465	241,059,099
1.1.2	Hasil Aset Nagari	544,222,000	160,662,000	383,560,000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari	044,543,453	016,920,453	027,623,000
1.2	Pendapatan Transfer	117,257,445,583	62,819,753,595	54,437,691,988
1.2.1	Dana Desa	62,342,074,000	31,796,036,000	30,546,038,000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1,529,922,483	1,074,547,900	455,374,583
1.2.3	Alokasi Dana Nagari	51,550,449,100	29,899,169,695	21,651,279,405
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1,835,000,000	050,000,000	1,785,000,000
1.3	Pendapatan Lain-lain	443,823,360	273,420,187	170,403,173
1.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	033,600,000	006,812,000	026,788,000
1.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Nagari	068,000,000	023,459,000	044,541,000
1.3.4	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	098,000,000	073,000,000	025,000,000
1.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	010,380,997	063,856,508	-053,475,511

1.3.6	Bunga Bank	220,295,363	101,123,879	119,171,484
1.3.7	Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	013,547,000	005,168,800	008,378,200
	JUMLAH PENDAPATAN	118,590,376,960	63,330,039,700	55,260,337,260

2. Meningkatnya kinerja aparatur nagari dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan nagari.
3. Mendorong tertib administrasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari baik administrasi keuangan maupun administrasi pemerintahan.
4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan (PKK, Posyandu, LPM) dan Lembaga Adat (KAN) sesuai dengan tugas dan fungsinya di nagari, jumlah LPM dan KAN di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat di tabel berikut:

DATA JUMLAH LPM DAN KAN SE-KABUPATEN SIJUNJUNG

TAHUN 2021

No .	Kecamatan	Jumlah LPM	Jumlah KAN	JUMLAH
1	Sijunjung	9	9	18
2	Koto VII	6	5	11
3	Sumpur Kudus	11	8	19
4	Kamang Baru	11	9	20
5	IV Nagari	5	5	10
6	Tanjung Gadang	9	7	16
7	Kupitan	4	3	7
8	Lubuk Tarok	6	4	10
TOTAL		61	50	111

5. Meningkatnya kapasitas sumber daya pemangku adat dan pengetahuan kader terhadap Posyandu, dimana Para Kader PKK dan Kader Posyandu dilakukan pembinaan dalam upaya melakukan 10 program pokok PKK dan kesehatan masyarakat terutama balita, saat ini di Kabupaten Sijunjung terdapat 3.442 orang Kader PKK di tingkat Nagari dan Jorong sebagaimana data tabel berikut:

JUMLAH KADER PKK

KABUPATEN SIJUNJUNG

DATA 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PKK			JUMLAH KADER	
		PKK JORONG	PKK NAGARI	DASAWISMA	AKTIF	PASIF
1	Sijunjung	53	9	594	260	0
2	Lubuk Tarok	25	6	230	184	0
3	Tanjung Gadang	41	9	371	620	0
4	Kupitan	14	4	188	262	0

5	IV Nagari	17	5	212	187	0
6	Koto VII	38	7	527	910	0
7	Sumpur Kudus	55	11	477	461	0
8	Kamang Baru	59	11	550	558	0
Jumlah		302	62	3149	3442	0

6. Terkoordinasinya dengan Tim permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung dalam upaya pencapaian SDG Desa yakni Desa Tanpa Kemiskinan.
- Perkembangan jumlah penduduk miskin, angka Kemiskinan, garis kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020, dapat dilihat tabel berikut ini.

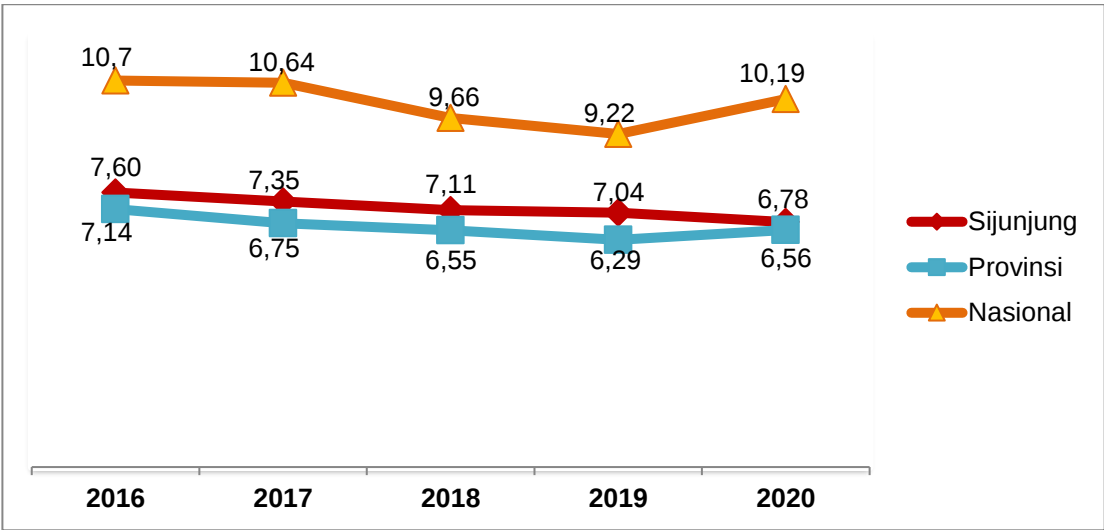
Tabel 2.2.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	17.120	16.830	16.550	16.650	16.280
2.	Angka Kemiskinan (%)	7,60	7,35	7,11	7,04	6,78
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	344.153	365.074	379.046	400.861	433.147
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,25	1,12	0,88	0,94	0,97

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2021

Disisi lain, penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung tersebut belum merubah posisinya terhadap rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dari daerah lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Disisi lain, posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata nasional.

Perkembangan posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung terhadap rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, tergambar pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

7. Meningkatnya sumber daya aparatur nagari

Walaupun secara kuantitas target capaian untuk indikator pembangunan pemberdayaan masyarakat dan nagari sudah tercapai, namun secara kapasitas/kualitas perlu ditingkatkan kembali. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencapaian target yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat/lembaga adat dan peningkatan kapasitas terhadap aparatur nagari supaya lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator-indikator yang digunakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam membangun nagari/desa cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan sangat kuat. Sehingga berimplikasi cenderung meningkatnya capaian indeks desa membangun dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 tercapai senilai 0,7024 dengan rasio capaian melebihi 100%, berdasarkan surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 bahwa jumlah desa berkembang pada Kabupaten Sijunjung sebanyak 39 Nagari dan Mandiri sebanyak 4 Nagari.

Berkaitan dengan persentase kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang aktif capaian sebesar 100%, pencapaian ini di dapat dari 50 lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Aspek Kelembagaan, seperti Sarana prasarana dan Aspek Kompetensi, seperti Penyelenggaraan organisasi yang sudah memiliki Rencana Kerja Tahunan, AD/ART, baru memenuhi kriteria minimal dan dapat di kategorikan Aktif, dari 4 (empat) aspek yang menjadi tolak ukur untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga terdepan dalam pemasyarakatan pengimplementasian ABS-SBK.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan nagari/desa yang baik	65	75	85	90	95
2	Persentase Lembaga Pem-berdayaan Masyarakat (LPM) aktif	90	100	100	100	100
3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
5	Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100
6	Indeks Desa Membangun	n.a	n.a	n.a	0,6985	0,7024

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.

2.3.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus di dalam pelaksanaannya masih ada tantangannya dan hambatan, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan BumNag di nagari dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan status Desa/Nagari Berkembang menjadi nagari/Desa Mandiri.
- 3) Meningkatkan fungsi Lembaga Adat dan Lembaga Desa/Nagari dalam berbagai posisi dan potensi.
- 4) Meningkatkan Kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan nagari.
- 5) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Nagari yang kredibel dan profesional.
- 6) Mewujudkan adanya komitmen dari aparatur nagari dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.
- 7) Seringnya perubahan regulasi baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menimbulkan kesulitan dalam implementasi regulasi tersebut di daerah dan tingkat Desa.
- 8) Terjadinya Pemotongan Anggaran (Rasionalisasi dan Refocussing) setiap Tahun Anggaran, sehingga tidak tercapai Target Indikator Kinerja yang di rencanakan sesuai Renstra.
- 9) Terjadinya Bencana Non Alam Pandemi Covid 19 yang mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2020.
- 10) Belum optimalnya sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari seperti mobilitas, peralatan kerja serta meubeler

2.3.2 Peluang

Adapun bentuk peluang yang dimiliki sebagai penunjang untuk dijadikan pengembangan, antara lain

- 1) Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan andil bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan di Nagari/desa.
- 2) Mewujudkan kemandirian masyarakat.
- 3) Lembaga adat yang ada di Nagari/Desa mendapat dukungan dari Pemerintah Nagari dalam pengembangan nilai-nilai adat dan budaya.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan dalam rangka Peningkatan kapasitas aparatur nagari, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
- 5) Fasilitasi dalam pembinaan administrasi pemerintahan maupun administrasi keuangan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- 6) Adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 7) Sarana dan Prasarana yang memadai.
- 8) Tingginya respon perempuan dalam berorganisasi dan aktif di PKK.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari, namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan pembangunan yang akan ditangani selama lima tahun mendatang berdasarkan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan nagari baik adiministrasi pemerintahan maupun administrasi keuangan
2. Belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam membangun wilayah secara mandiri
3. Masih kurangnya pelayanan dinagari terhadap masyarakat
4. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat Nagari/Desa (BumNag/BumDes) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN)
5. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari/desa dalam pemberdayaan masyarakat nagari
6. Belum optimalnya peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan masyarakat desa/nagari
7. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat dinagari
8. Dinamika regulasi ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di nagari
9. Belum maksimalnya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di nagari
10. Belum optimalnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi
11. Belum tersedianya peta batas administrasi nagari
12. Masih lambatnya perkembangan nagari sesuai Indeks Desa Membangun (IDM)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR YG MEMPENGARUHI
1	Peningkatan tata kelola admininstrasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari baik adiministrasi pemerintahan maupun administrasi keuangan	1. Masih rendahnya kemampuan aparatur nagari/desa dalam memahami tugas pokok dan fungsinya 2. Masih rendahnya SDM aparatur nagari 3. Minimnya kegiatan bimtek, sosialisasi maupun diklat yang dilaksanakan
2	Belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam membangun wilayah secara mandiri	1. Masih minimnya sarana dan prasarana ekonomi masyarakat 2. Akses informasi yang terbatas yang sulit dijangkau

		3. Potensi dan sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal 4. Minimnya kerja sama antar Nagari/Desa didalam Kabupaten Maupun Nagari/Desa anatar Kabupaten
3	Masih kurangnya pelayanan dinagari terhadap masyarakat	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPM dinagari
4	Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat Nagari/Desa (BumNag/BumDes)	1. Kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap keberadaan BumNag/BumDes 2. Rendahnya kemampuan nagari dalam analisa potensi usaha 3. Rendahnya SDM pengelola BumNag/BumDes 4. Belum optimalnya PAN yang bersumber dari BumNag/Bumdes 5. Belum optimalnya kerjasama antar BumNag/BumDes
5	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari/desa dalam pemberdayaan masyarakat nagari.	1. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah 2. Masih minimnya Sumberdaya Manusia dalam Lembaga Kemasyarakatan Nagari/Desa
6	Belum optimalnya peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan masyarakat desa/nagari	1. Pemberdayaan Tim Penggerak PKK dalam pembangunan di Nagari masih rendah 2. Tingkat partisipasi Tim Penggerak PKK masih rendah 3. Masih minimnya Sumberdaya Manusia Pengurus TP.PKK
7	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat di Nagari	1. Masih minimnya upaya dalam peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pemangku adat. 2. Masih minimnya sarana dan prasarana dan biaya operasional lembaga adat.
8	Dinamika regulasi ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Nagari	1. Perubahan regulasi ditingkat pemerintah pusat berlangsung cukup cepat sehingga perlu diikuti dengan perubahan regulasi ditingkat pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan nagari
9	Belum maksimalnya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Nagari	1. Belum teridentifikasi dan terinfentarisasinya kebutuhan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat baik teknologi baru maupun modifikasi teknologi 2. Kurangnya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
10	Belum optimalnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi	1. Masih adanya fungsi-fungsi organisasi yang belum terwadahi dengan baik

11	Belum tersedianya peta batas administrasi nagari	1. Masih rendah dan kurangnya pemahaman pemangku adat terhadap batas administrasi nagari
12	Masih lambatnya perkembangan nagari sesuai Indeks Desa Membangun (IDM)	1. Masih kurangnya peran Pemerintahan Nagari untuk aktif-kreatif membangun wilayah secara mandiri

3.2. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 adalah **“Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani”**.

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Sijunjung (termasuk didalamnya unsure pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Sijunjung yang sejahtera, unggul dan berbudaya. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sejahtera, Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Sijunjung yang didukung dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial budaya masyarakat, ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat & nilai tukar petani serta menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka & indeks ketimpangan pembangunan.
2. Unggul, terwujudnya kemampuan dan kekuatan sesuai dengan potensi yang ada untuk mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga Kab. Sijunjung unggul secara kualitas pembangunan ditingkat regional dan nasional yang ditandai meningkatnya posisi relatif relatif daerah terhadap rata-rata provinsi dan nasional.
3. Berbudaya, terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, sopan dan berbudi pekerti luhur, berakhlak dan berkesopanan serta memiliki rasa toleransi sesuai dengan falsafah adat minangkabau “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” yang ditandai berkurangnya konflik & sengketa antar adat/nagari .
4. Masyarakat Madani, masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi. Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih periode tahun 2021-2026 tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata
3. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta

pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari mendorong tercapainya Visi dan Misi sesuai tugas pokok dan fungsinya mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan 3 buah Misi yakni:

- A. **Misi satu** yaitu **meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi,**
- B. **Misi kedua** yaitu **meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata,**
- C. **Misi ketiga** yaitu **meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).**

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan nagari 2. Belum optimalnya pelayanan dinagari terhadap masyarakat	1. Masih rendahnya kemampuan aparatur nagari/desa dalam memahami tugas pokok dan fungsinya 2. Masih rendahnya SDM aparatur nagari 3. Minimnya kegiatan bimtek, sosialisasi maupun diklat yang dilaksanakan 4. belum optimalnya penerapan SOP dan SPM dinagari	1. Kemampuan Aparatur nagari dalam memahami tugas pokok dan fungsinya 2. SDM aparatur nagari yang berkualitas 3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan/ bimtek terhadap aparatur nagari 4. Penerapan SOP dan SPM secara maksimal 5. Tersedianya Peraturan
2.	Misi ke 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah	Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat Nagari/Desa (BumNag/BumDes)	1. Masih lemahnya konsep perencanaan nagari dalam melihat,	1. Adanya konsep perencanaan nagari yang baik sebagai landasan untuk mengembangka

			menilai dan memanfaatkan sumberdaya local sebagai basis ekonomi (local economic resources) sebagai landasan pijak membangun ekonomi kerakyatan melalui usaha ekonomi masyarakat (BumDes/B umNag) 2. Kapasitas SDM yang terbatas 3. Belum optimalnya tata kelola atau manajemen bumnag 4. Rendahnya dukungan dari pemangku kepentingan di nagari	n usaha ekonomi masyarakat 2. Adanya SDM yang berkualitas 3. Manajemen BumNag yang baik dan professional 4. Adanya komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pendirian usaha ekonomi masyarakat
3.	Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat dinagari	1. Pemahaman pemangku adat terhadap tugas dan fungsinya masih rendah 2. Masih rendahnya kualitas SDM pemangku adat dan minimnya sarana prasarana adat	1. Pemangku adat memahami tugas dan fungsinya 2. SDM pemangku adat yang berkualitas dan sarana prasarana yang cukup 3. Adanya komitmen pemerintah untuk menerapkan nilai-nilai ABS-SBK

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra Propinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3.1 Telaahan Visi dan Misi Kementerian desa, PDT, dan Transmigrasi
- Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pengertian dari visi tersebut adalah:

- a. **Perdesaan** adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. **Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
- c. **Keunggulan Daya Saing** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan Negara lainnya baik ditingkat regional maupun internasional.
- d. **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong** : merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan;
7. Meningkatkan penata kelolaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penelaahan atas rencana strategis Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yang menjadi acuan untuk pembangunan desa di Kabupaten Sijunjung. Arah Rencana Strategis perkembangan desa secara umum adalah peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia perdesaan yang unggul, dengan strategi peningkatan kapasitas system untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Propinsi Sumatera barat

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat terpilih untuk periode 2021-2026 adalah **“ Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”** dengan Tujuh (7) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas **Sumber Daya Manusia** yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan **Sosial Kemasyarakatan** berdasarkan falsafal Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan **produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**
4. Meningkatkan usaha **perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.**
5. Meningkatkan **ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.**
6. Meningkatkan **Pembangunan Infrastruktur** yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan **tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik** yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Adapaun Misi Gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

MISI 1 : “ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing.

Sasaran ke 4 : Meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi

Strategi : Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi pada Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintah Desa.

Adapun sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat yang menunjukan keselarasan dengan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMD
Propinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan status perkembangan desa	1. Peningkatan Kerjasama Desa 2. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa 3. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak 3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 4. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa 5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

			Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam PemanfaatanTTG
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Peningkatan tata Kelola lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa	1. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa 2. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 3. Meningkatnya Penataan Desa dan Desa Adat	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa 2. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 3. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 6. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 8. Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan 9. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 10. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 11. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis 12. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa 13. Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam PembiayaanDesa 14. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas

			Desa 15. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 16. Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa 17. Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa 18. Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota 19. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 20. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 21. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 22. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 23. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 24. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 25. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
--	--	--	---

			Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 26. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi 27. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 28. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa 29. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur lingkup Dinas PMD 2. Pengelolaan Adminstrasi pemerintahan yang sesuai dengan SOP 3. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	1. Pelatihan/Bimtek Aparatur sesuai dengan tupoksi 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Secara umum sasaran jangka menengah Renstra DPMN Kab Sijunjung selaras dengan sasaran Renstra DPMD Provinsi Sumatera Barat. Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra DPMD Provinsi untuk perkembangan desa/nagari adalah dengan meningkatkan tata kelola lembaga desa dan lembaga pemerintahan desa, serta meningkatkan perkembangan status desa. Adapun faktor penghambat dari pelayanan DPMN ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra DPMD Provinsi adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan nagari serta tata kelola lembaga kemasyarakatan desa/nagari.

Sementara itu faktor pendorong dari pelayanan DPMN ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra DPMD Provinsi Sumatera Barat adalah tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dalam melaksanakan roda pemerintahan dinagari.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Renstra ini DPMN mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten sijunjung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031. Dalam Dokumen Tata Ruang ini telah ditetapkan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang , Rencana Kawasan Strategis , Arahan pemanfaatan

Ruang, Arahana Pengendalian Ruang serta Hak, Kewajiban dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten Sijunjung. Sehingga pembangunan nagari selaras dengan arahan dalam Dokumen Rencana tata Ruang Kabupaten Sijunjung.

Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah ditetapkan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam rangka Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) dengan Indikator yaitu (1) *Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur*, (2) *Jumlah Desa Mandiri* dengan program dan indikator Program seperti table berikut :

Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019
Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Program Penataan Desa
Jumlah Desa Mandiri	Program Penataan Desa

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun penentuan isu-isu strategis yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Nagari
2. Masih Rendahnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat
3. Belum Optimalnya Peran Lembaga Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari
4. Kurang Optimalnya Kerjasama antar Desa/Nagari dan Pembentukan Kawasan Perdesaan dalam Peningkatan Ekonomi Desa/nagari
5. Peningkatan status perkembangan desa/nagari
6. Belum teridentifikasi dan terinventarisasinya kebutuhan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat baik teknologi baru maupun modifikasi teknologi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah kondisi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026. Rumusan **tujuan** ini merupakan penjabaran dari misi Bupati Sijunjung terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat desa/nagari. Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merumuskan **tujuan** sebagai yaitu:

1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang efektif, efisien dan transparan.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan **Sasaran** jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Nagari yang efektif, efisien dan transparan.
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari.
4. Meningkatnya Status Pembangunan Nagari.
5. Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang efektif, efisien dan transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari yang efektif, efisien dan transparan	1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi 1. Indeks transparansi dana desa 2. Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi pemerintahan nagari dengan skor minimal 90 3. Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi perkembangan nagari dengan kategori cepat berkembang	72,50 70 40 50	72,65 75 50 60	72,90 80 60 70	73,00 85 70 80	73,21 90 80 85	73,25 95 90 90
2	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.	3. Meningkatnya Pendapatan Asli Desa/Nagari	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Desa/Nagari	12%	13%	14%	15%	16%	18%
3	2. Meningkatnya Kualitas pemberdayaan dan Jaminan Sosial Masyarakat	4. Meningkatnya status pembangunan nagari	2. Persentase peningkatan status desa mandiri	2%	1%	2%	2%	2%	2%
4	3. Meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal.	1. Meningkatnya kualitas lembaga adat	1. Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	10%	10%	10%	10%	10%	10%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan menentukan pilihan strategi yang perlu dilakukan oleh DPMN Kabupaten Sijunjung kemudian dapat dirumuskan kebijakan apa saja yang perlu diambil agar selaras dengan visi, misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani		
MISI 1	:	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Responsif Berbasis Reformasi Birokrasi		
Tujuan	:	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan birokrasi yang berkinerja dan akuntabel		1. Meningkatkan akuntabilitas organisasi	1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional dan berintegritas	1. Peningkatan kualitas nilai SAKIP
		2. Meningkatkan kualitas pemerintahan nagari yang efektif,efisien dan transparan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana	2. Peningkatan kualitas SPIP
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan nagari yang efektif, efisien dan transparan			2. Mengoptimalk an kualitas kinerja aparatur nagari dalam penyelenggara an pemerintahan nagari/desa yang akuntabel	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
				2. Pembinaan terhadap aparatur nagari
				3. Peningkatan kapasitas aparatur nagari
				4. Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan nagari
MISI 2	:	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata		
Tujuan		Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
1. Meningkat-nya Pendapatan Masyarakat		1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa/Nagari	1. Mengoptimalk an perkembanga n BumNag	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola BumNag
			2. Mengoptimalk an peran lembaga perekonomian nagari dalam meningkatkan perekonomian nagari	2. Peningkatan Fasilitasi, pembinaan serta monitoring perkembangan BumNag

2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya status pembangunan nagari	1. Mengoptimalkan kerjasama nagari 2. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa/Nagari 3. Meningkatkan Penataan Desa/Nagari	1. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari 2. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari dengan pihak ketiga 3. Fasilitasi tata wilayah Desa/Nagari 4. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana nagari
MISI 3 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas, Sehat dan Produktif Berbasis Teknologi dalam Tatanan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)			
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	Sasaran Meningkatnya kualitas lembaga adat	Strategi 1. Mengoptimalkan kualitas lembaga adat dalam meningkatkan peran dan fungsinya di nagari 2. Mengoptimalkan kualitas SDM lembaga adat 4. Mengoptimalkan Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	Arah Kebijakan 1. Pembinaan terhadap pemangku adat 2. Peningkatan kompetensi pemangku adat 3. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat di nagari

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan target yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung telah merencanakan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
(1)	(2)	(3)	(4)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(23)
			2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI			6.300		7.470		8.704		9.415		9.902		10.362		28.403		
Meningkatnya birokrasi yang berkinerja dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	85	2.977	85	3.432	85	4.366	90%	4.552	90%	5.007	95%	5.561	95%	5.560	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	39	85%	30	85%	82	90%	95	90%	109	95%	126	95%	126	DPMN	
			2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	35	3 dok	8	2 dok	40	2 dok	46	2 dok	53	2 dok	61	2 dok	61	DPMN	
			2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0	2 dok	10	2 dok	15	2 dok	17	2 dok	20	2 dok	22	2 dok	22	DPMN	
			2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	-	0	3 lap	12	3 lap	17	3 lap	20	3 lap	23	3 lap	26	3 lap	26	DPMN	Kab. Sijunjung

			2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	4	1 lap	-	1 lap	10	1 lap	12	1 lap	14	1 lap	16	1 lap	16	DPMN	
			2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	95	2.623	95	2.633	95	2.918	95	3.209	95	3.531	95	3.886	95	3.886	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 org/bln	2.566	26 Org/bln	2.566	26 Org/bln	2.823	28 org/bln	3.105	30 org/bln	3.416	30 org/bln	3.757	30 org/bln	3.757	DPMN	
			2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0	-	-	26 dok	17	28 dok	19	30 dok	21	30 dok	23	30 dok	23	DPMN	
			2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dok	43	3 Dok	47	3 Dok	54	3 Dok	59	3 Dok	65	3 Dok	71	3 Dok	71	DPMN	
			2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	10	1 lap	10	1 lap	12	1 lap	13	1 lap	15	1 lap	17	1 lap	17	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13 lap	4	13 lap	10	13 lap	12	13 lap	13	13 lap	15	13 lap	17	13 lap	17	DPMN	
			2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	95	-	95	23	95	27	95	31	95	36	95	41	95	41	DPMN	
			2.13.01.2.03.02	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	1 dok	18	1 dok	21	1 dok	24	1 dok	28	1 dok	32	1 dok	32	DPMN	

			2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	2 lap	5	2 lap	6	2 lap	7	2 lap	8	2 lap	9	2 lap	9	DPMN	
			2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	23	90	25	90	129	90	148	90	177	90	214	90	214,28	DPMN	
			2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pake t Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 pkt	23	49 pkt	25	51 pkt	29	51 pkt	33	51 pkt	38	52 pkt	44	52 pkt	44	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai i berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawa i Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	2 org	17	5 org	20	7 org	30	9 org	45	9 org	45	DPMN	
			2.13.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Oran g yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	5 org	23	5 org	26	5 org	30	5 org	34	5 org	34	DPMN	
			2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	5 org	60	5 org	69	5 org	79	5 org	91	5 org	91	DPMN	
			2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	109	90	232	90	289	90	327	90	370	90	420	90	420	DPMN	
			2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Pkt	7	1 Pkt	8	1 Pkt	9	1 Pkt	10	1 Pkt	12	1 Pkt	12	DPMN	
			2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapana Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Pkt	7	1 Pkt	8	1 Pkt	9	1 Pkt	10	1 Pkt	12	1 Pkt	12	DPMN	
			2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	-	-	1 Pkt	7	1 Pkt	8	1 Pkt	9	1 Pkt	10	1 Pkt	12	1 Pkt	12	DPMN	

			2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	1 Pkt	10	1 Pkt	12	1 Pkt	14	1 Pkt	16	1 Pkt	19	1 Pkt	19	DPMN	
			2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pkt barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Pkt	10	2 Pkt	10	2 Pkt	12	2 Pkt	14	2 Pkt	16	2 Pkt	19	2 Pkt	19	DPMN	
			2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 Dok	6	1 Dok	6	1 Dok	7	1 Dok	8	1 Dok	9	1 Dok	11	1 Dok	11	DPMN	
			2.13.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	-	-	1 Pkt	5	1 Pkt	6	1 Pkt	7	1 Pkt	8	1 Pkt	9	1 Pkt	9	DPMN	
			2.13.01.2.06.08	fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	5	1 laporan	25	1 laporan	29	1 laporan	33	1 laporan	38	1 laporan	44	1 pkt	44	DPMN	
			2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Dok	88	12 Dok	105	14 Dok	121	15 Dok	139	16 Dok	160	17 Dok	184	17 Dok	184	DPMN	
			2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	-	-	2 Dok	50	2 Dok	53	2 Dok	56	2 Dok	59	2 Dok	62	2 Dok	62	DPMN	
			2.13.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	2 Dok	25	2 Dok	29	2 Dok	33	2 Dok	38	2 Dok	38	DPMN	
			2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan	80	-	80	80	80	466	80	242	80	233	80	268	80	267	DPMN	
			2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	-	1 unit	30	1 unit	35	2 unit	74	1 unit	40	2 unit	46	2 unit	46	DPMN	
			2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	-	-	3 unit	10	3 unit	35	3 unit	40	3 unit	46	3 unit	53	3 unit	53	DPMN	
			5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	7 unit	-	7 unit	350	3 unit	75	3 unit	86	3 unit	99	3 unit	99	DPMN	

			5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	1 Unit	15	1 Unit	17	1 Unit	20	1 Unit	23	1 Unit	26	1 Unit	26	DPMN	
			5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	1 Unit	25	1 Unit	29	1 Unit	33	1 Unit	38	1 Unit	44	1 Unit	43	DPMN	
			2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	181	80%	230	80%	241	80%	254	80%	267	80%	280	80%	280	DPMN	
			2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam satu tahun	1 Pkt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMN	
			2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik, air dan telepon/fax yang dibayarkan	3 Pkt	72	3 Pkt	75	3 Pkt	79	3 Pkt	83	3 Pkt	87	3 Pkt	92	3 Pkt	92	DPMN	
			2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	-	0	1 pkt	8	1 Pkt	8	1 Pkt	9	1 Pkt	9	1 Pkt	10	1 Pkt	10	DPMN	
			2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 org	107	6 org	147	6 org	154	6 org	162	6 org	170	6 org	179	6 org	179	DPMN	
			2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	80%	2	80%	179	80%	214	80%	246	80%	283	80%	325	80%	325	DPMN	
			2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	15 unit	156	15 unit	179	15 unit	206	15 unit	237	15 unit	272	15 unit	272	DPMN	
			2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			40 Unit	3	40 Unit	5	15 unit	6	15 unit	7	15 unit	8	15 unit	8	DPMN	
			2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			11 unit	10	11 unit	15	50 unit	17	15 unit	20	15 unit	22	15 unit	22	DPMN	

			2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	2	1 unit	10	1 unit	15	1 unit	17	1 unit	20	1 unit	22	1 unit	22	DPMN	
Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitas penataan desa	2%	35	2%	366	2%	379	2%	425	2%	430	2%	434	2%	2.034	DPMN	
			2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari/Desa yang menyelenggarakan penataan desa	1 Nag	35	1 Nag	366	1 Nag	379	1 Nag	425	0	430	0	434	100	434	DPMN	
			2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah nagari yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status nagari	-	-	2 Nag	140	1 Nag	40	1 Nag	41	2 Nag	42	1 Nag	42	1 Nag	42	DPMN	
			2.13.02.2.01.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah nagari yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-	-	-	61 nag 1 desa	38	61 nag 1 desa	45	61 nag 1 desa	46	61 nag 1 desa	47	61 nag 1 desa	47	DPMN		
Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya status pembangunan nagari	Persentase peningkatan status desa mandiri	2.13.02.2.01.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah nagari yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	-	-	-	1 nag	37	1 nag	48	1 nag	49	1 nag	50	1 nag	50	DPMN		
			2.13.02.2.01.04	Fasilitas Penaman dan Kode Desa	Jumlah nagari yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode nagari	-	-	-	1 nag	37	1 nag	46	1 nag	47	1 nag	48	1 nag	48	DPMN		
			2.13.02.2.01.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana nagari	unit	35	unit	226	unit	227	unit	245	unit	246	unit	247	unit	247	DPMN	
Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan	Persentase Desa Mandiri	02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase fasilitas penataan desa	5%	-	5%	140	5%	145	5%	163	5%	165	5%	166	30%	779		
masyarakat	desa		2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja sama antar Desa	Jumlah kerjasama nagari yang difasilitasi	5	-	5	140	5	145	5	163	5	165	5	166	30	779	DPMN	
			2.13.03.2.01.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar nagari dalam Kabupaten/Kota	1 Dok	-	1 Dok	20	1 Dok	23	1 Dok	28	1 Dok	29	1 Dok	30	1 Dok	130	DPMN	

			2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar nagari dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dok		1 Dok	20	1 Dok	22	1 Dok	25	1 Dok	26	1 Dok	26	1 Dok	119		
			2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			1 dok	100	1 dok	100	1 dok	110	1 dok	110	1 dok	110	1 dok	530	DPMN	
Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa/nagari yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari	10%	2.301	40%	2.166	50%	2.399	60%	2.689	70%	2.700	80%	2.581	80%	12.535	DPMN	
					Persentase nagari/desa dengan indeks transparansi dana desa kategori baik	25%		32%		41%		49%		57%		65%		65%			
					Persentase Peningkatan BUMNAG berkembang	5%		10%		10%		10%		10%		10%		50%			
			2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari/Desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/nagari	60 nag 1 desa	2.301	61 nag 1 desa	2.166	61 nag 1 desa	2.399	61 nag 1 desa	2.689	61 nag 1 desa	2.700	61 nag 1 desa	2.581	61 nag 1 desa	12.535	DPMN	
					Jumlah BumNag yang difasilitasi dan dibina untuk berkembang			15Bumna g		15Bumna g		15Bumna g		15Bumna g		15Bumna g					

					Jumlah nagari yang difasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitasnya			61 nag 1 desa		61 nag 1 desa		61 nag 1 desa		61 nag 1 desa		61 nag 1 desa					
			2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	62 Dok	49	62 Dok	50	62 Dok	52	62 Dok	85	62 Dok	49	62 Dok	85	62 Dok	321	DPMN	
			2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	-	-	5 dok	20	5 dok	100	5 dok		5 dok	90	5 dok	210	DPMN	
			2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang difasilitasi	Dok	53	Dok	140	Dok	140	Dok	189	Dok	76	Dok	196	Dok	741	DPMN	
			2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dok	1.130	Dok	1.190	Dok	1.180	Dok	1.235	Dok	1.235	Dok	1.235	Dok	6.075	DPMN	
			2.13.04.2.01.05	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 org		43 orang		62 orang		50	62 orang	65		62 orang				62 orang	
			2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggara n Musyawarah Desa	Lap	23	Lap	75	Lap	57	Lap	65	Lap		Lap	65	Lap	262	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	-	-	-	3 dok	15	6 dok	35	2 dok		3 dok	35	60 nag 1 desa	85	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dok	116	Dok	250	Dok	175	Dok	245	Dok	85	Dok	200	Dok	955		
			2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Lap	789	-	-	Lap	200	-	-	Lap	900	-	-	-	1.100	DPMN	

			2.13.04.2.01.1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	Lap	20	Lap	23	Lap	45	Lap		Lap	45	Lap	133	DPMN	
			2.13.04.2.01.1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	-	-	Dok	20	Dok	35	Dok	55	Dok		Dok	45	Dok	155	DPMN	
			2.13.04.2.01.1 2	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-	-	Dok	20	Dok	35	Dok		Dok	40	Dok	95	DPMN	
			2.13.04.2.01.1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dok	27	Dok	75	Dok	77	Dok	135	Dok	105	Dok	115	Dok	507	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.04.2.01.1 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	-	56 Orang	60	62 Orang	73	62 Orang	95	62 Orang	95	62 Orang	110	62 Orang	433	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.04.2.01.1 5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Nag	114	Nag	145	Nag	146	Nag	155	Nag	155	Nag	155	Nag	756	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.04.2.01.1 6	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	Lap	30	Lap	25	Lap	30	Lap		Lap	35	Lap	120	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.04.2.01.1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah nagari yang melaksanakan urusan/kewenangan kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.04.2.01.1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	Dok	111	Dok	111	Dok	120	Dok		Dok	130	Dok	472	DPMN	Kab. Sijunjung

Meningkatkan Pendapatan masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Asli Desa/Nagari	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Desa/Nagari	02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat Penurunan Sengketa Adat		18%	987	16%	1.366	13%	1.415	10%	1.586	7%	1.600	5%	1.620	5%	7.495	DPMN	Kab. Sijunjung
Meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang Aktif		20%		25%		30%		40%		50%		60%		60%			
			2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina		250	987	250	1.366	250	1.415	250	1.586	250	1.600	250	1.620	250	7.495	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 lembaga		130	22 lembaga	176	Dok	180	Dok	201	Dok	203	Dok	206	Dok	966	DPMN	

			2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 org	287	40 org	275	Lembaga	280	Lembaga	325	Lembaga	327	Lembaga	330	Lembaga	1.537	DPMN	
			2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	unit	10	unit	25	unit	27	unit	30	unit		DPMN	
			2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	-	85	Dok	95	Dok	135	Dok	140	Dok	142	Dok	597	DPMN	Kab. Sijunjung
			2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	61 nag 1 desa	100	Lap	105	Lap	125	Lap	127	Lap	130	Lap	587		
			2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	61 nag 1 desa	30	Lap	35	Lap	45	Lap	46	Lap	47	Lap	203	DPMN	Kab. Sijunjung

			2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat nagarinya														
			2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 pkt	570	6 pkt	700	Dok	710	Dok	730	Dok	730	Dok	735	Dok	3.605

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Daerah Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan yang mengacu pada Tujuan Tujuan dan Sasaran RPJMD, ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Desa Membangun	0,7024	0,7273	0,7500	0,7900	0,80000	0,8300	0,8500
2.	Tingkat Penurunan Sengketa Adat	21	18	16	13	10	7	5
3.	Persentase Peningkatan Status Nagari/Desa Mandiri	2	2	2	2	2	2	2

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mengacu pada RPJMD

NO	Indikator Kinerja Progran	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri	1,25	2	2	2	2	2	2

2.	Jumlah Desa Mandiri	9	18	18	36	62	62	62
3.	Persentase Nagari yang dilaksanakan Penataan Nagari	10	10	40	50	60	70	80
4.	Jumlah Kerjasama	0	1	5	5	5	5	5
5.	Persentase aparaturn pemerintahan Nagari/Desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	10	10	40	50	60	70	80
6.	Persentase Nagari/Desa dengan indeks transparansi Dana Desa kategori baik	0	25	32	41	49	57	65
7.	Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Berkembang	5	5	10	10	10	10	10
8.	Tingkat penurunan sengketa adat	21	18	16	13	10	7	5
9.	Persentase lembaga kemasyarakatan Nagari yang aktif	15	20	25	30	40	50	60

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dimaksudkan untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas selama lima tahun kedepan. Setiap tahunnya juga akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan akan dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan tanpa mengubah tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik secara segi kualitas maupun kuantitas didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Muaro Sijunjung, 23 September 2021

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Nagari



KHAMSIARDI, SSTP, M.Si
NIP 19830908 200212 1 001